

**PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
KOORDINATOR PROGRAM
SEKRETARIAT PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
GRANT NO. TF0A7565/Register No. 278EATNA**

No. 04/ULP.ST17/01.07/03/2019

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi yang didanai oleh grant No. TF0A7565, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. KOORDINATOR PROGRAM (1 orang)

kode : KP

Kualifikasi :

- a. Latar belakang Pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, epidemiologi, social atau bidang lainnya yang relevan.
- b. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 10 tahun dan pernah bekerja sebagai koordinator/ketua tim minimal selama 7 tahun
- c. Diutamakan memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL/IELTS yang masih berlaku

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung, yang terdiri dari :

- a. Daftar Riwayat Hidup (form terlampir)
- b. Salinan KTP dan NPWP
- c. Salinan ijazah dan transkrip nilai
- d. Salinan Bukti pembayaran pajak
- e. Salinan Referensi/Bukti kontrak

Bagi yang berminat dapat mengirimkan data dukung tersebut
paling lambat **8 April 2019**, ditujukan kepada :

**Pokja III Unit Layanan Pengadaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
e-mail : ulp@bappenas.go.id**

Jakarta, 29 Maret 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINATOR PROGRAM
SEKRETARIAT PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* (pendek) pada anak bawah lima tahun (balita) dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018). Demikian halnya dengan proporsi balita yang mengalami *wasting* (kurus) menurun dari 12,1 persen (2013) menjadi 10,2 persen (2018). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun selain berdampak pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Anak yang mengalami *stunting* juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular (PTM).

Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) dengan fokus pada 1.000 HPK yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013. Sebagai bagian dari Gernas PPG, pemerintah menerbitkan Kerangka Kebijakan¹ dan Panduan Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1.000 HPK.² Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *stunting*. Indikator dan target penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target sebesar 28 persen pada tahun 2019³. Sasaran tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan dimana penurunan *stunting* menjadi agenda prioritas sejak Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.

Pada tanggal 12 Juli 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk pencegahan *stunting*. Rapat memutuskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi perlu dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Upaya penurunan dan pencegahan *stunting* ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.

¹ Kerangka Kebijakan Gernas 1000 HPK, 2013

² Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Gernas 1000 HPK, 2013

³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Untuk mempercepat upaya penurunan *stunting*, pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Bank Dunia selama periode 2018-2021. Pelaksanaan PforR INEY akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF akan digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan komponen hibah GFF di Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2019 akan difokuskan pada: (1) penguatan kapasitas sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan daerah; (3) peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penurunan *stunting*; (4) peningkatan kapasitas review laporan kinerja anggaran; (5) penguatan koordinasi Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG); (6) penguatan review teknis kebijakan dan program pencegahan *stunting* dan kesehatan ibu dan anak; dan (7) penyediaan dukungan dalam *knowledge platform* untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran integrasi program untuk direplikasikan.

Sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan tenaga ahli yang mampu mengoordinasikan seluruh kegiatan, program, kebijakan, serta teknis perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* terintegrasi.

B. Tujuan

Posisi ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan memastikan seluruh kegiatan hibah INEY di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan sesuai rencana dan mencapai *output* yang diharapkan. Posisi ini juga bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan dan memelihara koordinasi serta sistem manajemen kegiatan Sekretariat Pengelola Hibah INEY. Bekerja sama dengan mitra K/L lain dan seluruh pemangku kepentingan terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat pusat dan daerah.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap pengawasan (*overseeing*) efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang didukung hibah INEY
2. Menyusun rencana kerja tahunan pelaksanaan kegiatan hibah INEY, berkoordinasi dengan tenaga ahli/konsultan dan mitra kerja dalam GFF
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GFF di Indonesia serta memberikan usulan perbaikan yang diperlukan
4. Ikut serta dalam *webinar* GFF yang dilaksanakan secara rutin untuk berbagi pengalaman dengan negara lain tentang pelaksanaan GFF di Indonesia

5. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Sekretariat SUN dan tenaga ahli terkait untuk diseminasi hasil kegiatan, *update dashboard*, dan/atau publikasi laporan melalui *website* Gernas-PPG (*cegahstunting.id*)
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan yang dilakukan oleh tenaga ahli/konsultan dan tim kajian
7. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah INEY secara berkala tiga bulanan mencakup administratif dan substansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan efektivitas pelaksanaan kegiatan ke depan
8. Penugasan lain yang di minta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

D. Keluaran

1. Rencana kerja tahunan pelaksanaan kegiatan hibah INEY
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GFF di Indonesia beserta rekomendasi perbaikan yang diperlukan
3. Laporan hasil webinar GFF yang dilaksanakan secara rutin
4. Laporan mengenai diseminasi hasil kegiatan, *update dashboard*, dan laporan pengelolaan *website* Gernas-PPG (*cegahstunting.id*)
5. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan GFF secara berkala tiga bulanan mencakup administratif dan substansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan efektivitas pelaksanaan kegiatan ke depan
6. Laporan kegiatan dan dokumen dukungan lain.

E. Syarat dan Kualifikasi

Persyaratan:

Posisi ini untuk individu yang profesional dan bukan PNS atau anggota TNI/Polri serta bersedia bekerja secara *fulltime*.

Pendidikan:

Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, epidemiologi, sosial, atau bidang lainnya yang relevan.

Pengalaman:

- a. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 10 tahun dan pernah bekerja sebagai koordinator/ketua tim minimal selama 7 tahun
- b. Diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman kerjasama dengan sektor-sektor di bidang kesehatan dan gizi masyarakat
- c. Memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL/IELTS yang masih berlaku.

F. Lokasi Kegiatan

Kantor Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Gedung MR21 (Menara Jasindo), Jl. Menteng Raya RT.1 RW.10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340

G. Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) orang Koordinator Program Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) termasuk pajak dan akan dibiayai melalui dana yang bersumber dari hibah INEY pada DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019. Pelaksanaan kegiatan Koordinator Program pada Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah selama 8 (delapan) bulan yang dimulai dari bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019 yang dibebankan kepada MAK 522191, sedangkan jenis kontrak adalah Kontrak Lumpsum, dimana dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 35.000.000,- berdasarkan kehadiran (*time based*) dengan total selama 8 bulan yaitu Rp. 280.000.000,-.

H. Proses Pengadaan

Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh pelamar yang diterima. Selanjutnya dibuat *shortlist* untuk kemudian dilakukan mekanisme wawancara, yang kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan (*No Objection Letter/NOL*). Berdasarkan NOL dari Bank Dunia dan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas, maka akan disusun kelengkapan dokumen kontrak kerja untuk ditandatangani antara PPK bersama kandidat terpilih.

I. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Satker Kementerian PPN/Bappenas.

J. Jadwal Kegiatan

Kontrak kegiatan berdasarkan waktu atau kehadiran (*time based*) dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan kegiatan hibah INEY, berkoordinasi dengan tenaga ahli/konsultan dan mitra kerja dalam GFF								

No	Aktivitas	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
2	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GFF di Indonesia serta memberikan usulan perbaikan yang diperlukan								
3	Webinar GFF yang dilaksanakan secara rutin untuk berbagi pengalaman dengan negara lain tentang pelaksanaan GFF di Indonesia								
4	Diseminasi hasil kegiatan, <i>update dashboard</i> , dan/atau publikasi laporan melalui <i>website</i> Gernas-PPG (<i>cegahstunting.id</i>), bekerja sama dan berkoordinasi dengan Sekretariat SUN dan tenaga ahli/konsultan terkait								
5	Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah INEY secara berkala tiga bulanan mencakup administratif dan substansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan efektivitas pelaksanaan kegiatan ke depan								
6	Pelaksanaan tugas dan pekerjaan lain sesuai dengan permintaan PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)								

Jakarta, Maret 2019

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan,
Satker Kementerian PPN/Bappenas


Risky Firmansyah, S.E.
NIP. 19881210 201503 1 003

B. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup

1. Posisi yang diusulkan : _____
2. Nama Tenaga Ahli : _____
3. Tempat/Tanggal Lahir : _____
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah) : _____
5. Pendidikan Non Formal : _____
6. Penguasaan Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia : _____
7. Pengalaman Kerja¹
 - Tahun ini _____
 - a. Nama Pekerjaan : _____
 - b. Lokasi Pekerjaan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Uraian Tugas : _____
 - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal bulan tahun)
 - f. Posisi Penugasan : _____
 - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____
 - Tahun sebelumnya
 - a. Nama Pekerjaan : _____
 - b. Lokasi Pekerjaan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Uraian Tugas : _____
 - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal bulan tahun)
 - f. Posisi Penugasan : _____
 - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____
 - dst.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

_____, 20____
Yang membuat pernyataan

(_____)
[nama jelas]

¹ Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, 20__

Yang membuat
pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN
PENAWARAN BIAYA

A. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	_____
II	Biaya Langsung Non-Personil	_____
	Sub-total	_____
	PPH	_____
	Total	_____
Terbilang: _____		